



## BUPATI HALMAHERA SELATAN PROVINSI MALUKU UTARA

---

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN  
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK  
DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa, yang menyatakan Alokasi Dana Desa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara R.I. Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 3961);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4264);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara R.I. Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4355);

7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara R.I. Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara R.I. Tahun 2017 Nomor 73, Tamabahan Lemabara Negara R.I. Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2007 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Halmahera Selatan Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Selatan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Bupati adalah Bupati Halmahera Selatan
4. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Halmahera Selatan
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa
10. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan
15. Alokasi Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, selanjutnya disebut Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

BAB II  
ALOKASI DANA BAGI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 2

- (1). Pemerintah Daerah menetapkan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2). Besarnya Dana bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun sebelumnya.
- (3). Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dialokasikan dalam APBD setiap tahun anggaran

BAB III  
PENGHITUNGAN BAGI HASIL  
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

- a. 60% (enam puluh persen) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi dasar dan dibagi secara merata kepada seluruh Desa;
- b. 40% (empat puluh persen) dari bagi hasil pajak dan retribusi sebagai alokasi proporsional dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari desa masing-masing

Pasal 4

- (1) Besaran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dihitung dengan rumus, yaitu :

$$DBHPx = DBHPMx + DBHPPx$$

DBHPx = Dana Bagi Hasil Pajak Desa x

DBHPMx = Dana Bagi Hasil Pajak Merata yang diterima Desa

DBHPPx = Dana Bagi Hasil Pajak Proporsional untuk Desa x

- (2) Besarnya Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Merata untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$DBHPMx = \frac{\Sigma DBHP \times 60\%}{\text{Jumlah Desa Se-Kabupaten}}$$

DBHPMx = Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Merata Desa x

$\Sigma$  DBHP = Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Kabupaten

Jumlah Desa se Kabupaten = Jumlah Desa dalam Kabupaten

- (3) Besarnya Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$\text{[Empty box for formula]}$$

- (4) Besaran Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah dihitung dengan rumus, yaitu :

$$DBHRx = DBHRMx + DBHRPx$$

DBHRx = Dana Bagi Hasil Retribusi Desa x

DBHRMx = Dana Bagi Hasil Retribusi Merata yang diterima Desa

DBHRPx = Dana Bagi Hasil Retribusi Proporsional untuk Desa x

- (5) Besarnya Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Merata untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$DBHRMx = \frac{\Sigma DBHR \times 60\%}{\text{Jumlah Desa Se-Kabupaten}}$$

DBHRMx = Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Merata Desa x

$\Sigma$  DBHR = Jumlah Dana Bagi Hasil Retribusi Kabupaten

Jumlah Desa se Kabupaten = Jumlah Desa dalam Kabupaten

- (6) Besarnya Alokasi Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$DBHRPx = \Sigma DBHRx \times 40\%$$

DBHRPx = Dana Bagi Hasil Pajak Proporsional Setiap Desa

$\Sigma$  DBHRx = Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak Setiap Desa

- (7) Hasil penghitungan bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Daerah ini.
- (8) Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah yang diterima Desa dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

#### BAB IV PENYALURAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

##### Pasal 5

- (1). Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2). Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara bertahap yakni :
  - a. Tahap I, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus)
  - b. Tahap II, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh perseratus)
- (3). Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
  - a. Peraturan Desa tentang APBDesa, dan
  - b. Laporan realisasi penggunaan tahun sebelumnya

- b. Laporan realisasi penggunaan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh perseratus)

BAB V  
PENGUNAAN DANA BAGI HASIL  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 6

- (1) Kegiatan yang didanai oleh Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa dan dibahas dalam musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) serta mengacu pada RPJMDesa dan RKPdesa
- (2) Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam APBDesa yang dipergunakan untuk :
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan desa
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan desa
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat. Dan
  - e. intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak dan retribusi

BAB VI  
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 8

Pertanggungjawaban Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 9

Pengawasan terhadap kegiatan yang didanai dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan secara fungsional oleh Pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Selatan.

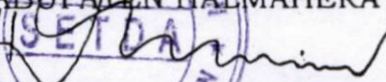
Ditetapkan di Labuha  
pada tanggal 15 Februari 2019

BUPATI HALMAHERA SELATAN,



Diundangkan di Labuha  
pada tanggal 15 Februari 2019

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN,

  
HELMI SURYA BOTUTIHE,  
NIP. 19650621 198603 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2019 NOMOR.9

Salinan Sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

TTD  
ILHAM ABUBAKAR, SH  
Nip. 19690307 200212 1 008

LAMPIRAN :  
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2019  
 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA  
 BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

**RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA  
 DI KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2019**

<b>KECAMATAN</b>	<b>NO.</b>	<b>DESA</b>	<b>BAGI HASIL PAJAK YANG DITERIMA DESA</b>	<b>BAGI HASIL RETRIBUSI YANG DITERIMA DESA</b>	<b>JUMLAH DANA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI YANG DITERIMA DESA</b>
<small>1</small>	<small>2</small>	<small>3</small>	<small>4</small>	<small>5</small>	<small>6+5</small>
1. BACAN	1	SUMAE	2,514,513	578,751	3,093,264
	2	BELANG - BELANG	2,986,099	578,751	3,564,850
	3	INDOMUT	3,131,879	700,751	3,832,630
	4	AMASING KALI	3,305,043	578,751	3,883,794
	5	AMASING KOTA	12,465,406	922,831	13,388,237
	6	LABUHA	53,442,443	19,222,260	72,664,703
	7	TOMORI	62,618,953	3,505,196	66,124,149
	8	SUMATINGGI	2,090,740	578,751	2,669,491
	9	HIDAYAT	8,430,053	969,591	9,399,644
	10	MARABOSE	5,427,258	1,097,701	6,524,959
	11	AMASING KOTA BARAT	2,035,383	717,451	2,752,834
	12	AMASING KOTA UTARA	2,034,232	578,751	2,612,983
	13	AWANGGO	2,563,605	578,751	3,142,356
	14	KAPUTUSANG	4,012,601	578,751	4,591,352
2. BACAN SELATAN	1	MANDAWONG	11,667,664	1,872,753	13,540,417
	2	PAPALOANG	3,153,761	578,751	3,732,512



	3	KAMPUNG MAKIAN	10.074.002	889.527	10.963.529
	4	KUPAL	5.802.161	4.611.191	10.413.352
	5	GANDASULI	6.365.550	608.431	6.973.981
	6	TUWOKONA	4.260.135	604.971	4.865.106
	7	PANAMBUANG	5.444.192	858.751	6.302.943
	8	SAWADAI	2.761.709	578.751	3.340.460
	9	TEMBAL	5.141.897	5.626.351	10.768.248
	10	KUBUNG	2.863.556	578.751	3.442.307
3. BACAN TIMUR	1	BABANG	20.257.274	5.153.564	25.410.838
	2	BORI	3.486.353	578.751	4.065.104
	3	NYONYIFI	2.359.242	578.751	2.937.993
	4	SABATANG	1.969.383	578.751	2.548.134
	5	GORO-GORO	2.228.991	578.751	2.807.742
	6	TIMLONGA	1.969.383	578.751	2.548.134
	7	SALI KECIL	3.002.452	698.751	3.701.203
	8	SAYOANG	5.386.158	3.527.199	8.913.357
	9	WAYAMIGA	7.186.571	956.684	8.143.255
	10	KAIREU	2.085.127	578.751	2.663.878
4. BACAN BARAT	1	TAWABI	2.004.911	578.751	2.583.662
	2	NONDANG	2.168.506	578.751	2.747.257
	3	INDARI	2.123.543	578.751	2.702.294
	4	KUSUBIBI	2.093.596	578.751	2.672.347
	5	KOKOTU	1.969.383	578.751	2.548.134
	6	NANG	1.969.383	578.751	2.548.134
	7	WIRING	2.049.209	578.751	2.627.960
5. BACAN BARAT UTARA	1	YABA	2.513.763	578.751	3.092.514
	2	GETI BARU	2.119.374	578.751	2.698.125
	3	GETI LAMA	2.082.486	578.751	2.661.237
	4	GILALANG	2.025.660	578.751	2.604.411
	5	JOJAME	1.969.383	578.751	2.548.134
	6	NUSABABULLAH	2.020.794	578.751	2.599.545
	7	SIDOPO	2.089.743	578.751	2.668.494
	8	LOID PULAU	2.027.944	578.751	2.606.695

6. BACAN TIMUR TENGAH	1	TAWA	2.949.385	578.751	3.528.136
	2	BIBINOI	4.698.559	578.751	5.277.310
	3	SONGA	3.352.502	578.751	3.931.253
	4	TABAPOMA	2.912.447	578.751	3.491.198
	5	TOMARA	3.050.867	578.751	3.629.618
	6	TUTUPA	2.538.916	578.751	3.117.667
	7	WAYATIM	2.502.165	578.751	3.080.916
7. BACAN TIMUR SELATAN	1	WAYAUA	12.586.054	627.711	13.213.765
	2	WAYAKUBA	2.104.914	578.751	2.683.665
	3	PIGARAJA	3.971.951	578.751	4.550.702
	4	SILANG	1.969.383	578.751	2.548.134
	5	LIARO	2.213.914	578.751	2.792.665
	6	TABANGAME	2.380.720	578.751	2.959.471
	7	TABAJAYA	2.382.812	578.751	2.961.563
8. KASIRUTA TIMUR	1	LOLEQJAYA	2.305.347	578.751	2.884.098
	2	JERET	1.992.952	578.751	2.571.703
	3	KASIRUTA DALAM	2.217.887	578.751	2.796.638
	4	KOUBALABALA	2.019.820	578.751	2.598.571
	5	LOLEOMEKAR	1.969.383	578.751	2.548.134
	6	MARITUSO	2.092.643	858.751	2.951.394
	7	TAWA TUAMODA	2.093.536	578.751	2.672.287
	8	TUTUHU	2.037.789	578.751	2.616.540
9. KASIRUTA BARAT	1	PALAMEA	2.059.591	578.751	2.638.342
	2	DOKO	2.049.383	578.751	2.628.134
	3	BISORI	2.287.303	578.751	2.866.054
	4	ARUMAMANG	2.187.816	578.751	2.766.567
	5	IMBU IMBU	2.213.630	578.751	2.792.381
	6	KUKUPANG	2.060.753	578.751	2.639.504
	7	LATA-LATA	1.969.383	578.751	2.548.134
	8	MARIKAPAL	2.162.846	578.751	2.741.597
	9	SENGGA BARU	1.969.383	578.751	2.548.134
	10	SIDANGA	2.068.657	578.751	2.647.408

10. BOTANGLOMANG	1	BAJO	2.122.322	690.921	2.813.243
	2	BATUTAGA	2.041.813	590.611	2.632.424
	3	KAMPUNG BARU	2.049.383	8.871.522	10.920.905
	4	PAISUMBAOS	2.025.383	578.751	2.604.134
	5	PRAPAKANDA	2.151.463	578.751	2.730.214
	6	SAWANAKAR	2.010.558	578.751	2.589.309
	7	TANJUNG OBIT	2.087.553	578.751	2.666.304
	8	TOIN	2.089.383	578.751	2.668.134
11. MANDIOLI UTARA	1	INDONG	3.207.955	903.323	4.111.278
	2	AKEDABO	2.047.331	578.751	2.626.082
	3	BOBO	2.164.310	578.751	2.743.061
	4	LOLEONGUSU	1.993.957	578.751	2.572.708
	5	PELITA	3.558.241	578.751	4.136.992
	6	WAYA	4.304.023	578.751	4.882.774
12. MANDIOLI SELATAN	1	JIKO	4.375.399	578.751	4.954.150
	2	GALALA	5.308.852	578.751	5.887.603
	3	BAHU	3.193.440	578.751	3.772.191
	4	LELE	3.115.969	578.751	3.694.720
	5	YOYOK	2.066.903	578.751	2.645.654
	6	TABALEMA	2.048.326	578.751	2.627.077
13. GANE BARAT	1	LEMO-LEMO	2.149.473	578.751	2.728.224
	2	TABAMASA	2.068.029	578.751	2.646.780
	3	PAPACEDA	1.969.383	578.751	2.548.134
	4	OHA	2.651.884	578.751	3.230.635
	5	BALITATA	2.792.698	578.751	3.371.449
	6	BUMI RAHMAT	2.819.141	578.751	3.397.892
	7	SAKETA	4.913.341	1.800.356	6.713.697
	8	CANGO	3.256.505	578.751	3.835.256
	9	KOITITI	3.967.381	578.751	4.546.132
	10	DORO	2.980.198	578.751	3.558.949
14. GANE BARAT SELATAN	1	SEKELY	1.969.383	578.751	2.548.134
	2	YAMLI	2.129.444	578.751	2.708.195
	3	GANE DALAM	15.181.345	578.751	15.760.096

	4	JOBUBU	2.080.939	578.751	2.659.690
	5	AWIS	2.009.383	578.751	2.588.134
	6	PASI PALELE	2.051.983	578.751	2.630.734
	7	TAWABI	2.122.041	578.751	2.700.792
	8	DOWORA	2.029.383	578.751	2.608.134
15. GANE BARAT UTARA	1	BOSSO	3.011.382	578.751	3.590.133
	2	FULAI	2.837.009	578.751	3.415.760
	3	DOLIK	4.256.909	1.029.999	5.286.908
	4	SUKA DAMAI	2.411.923	578.751	2.990.674
	5	TOKAKA	2.933.510	578.751	3.512.261
	6	NURJIHAT	2.180.448	578.751	2.759.199
	7	MOLOKU	2.647.805	578.751	3.226.556
	8	SAMO	2.069.753	578.751	2.648.504
	9	SAMAT	1.969.383	578.751	2.548.134
	10	POSI - POSI	2.067.877	578.751	2.646.628
	11	GUMIRA	2.261.089	578.751	2.839.840
	12	BATULAK	2.126.061	578.751	2.704.812
16. KEP. JORONGA	1	KUKUPANG	1.969.383	578.751	2.548.134
	2	KURUNGA	2.016.303	578.751	2.595.054
	3	GONONE	2.135.635	578.751	2.714.386
	4	TAWABI	2.026.387	632.751	2.659.138
	5	PULAU GALA	2.004.883	578.751	2.583.634
	6	YOMEN	2.046.753	578.751	2.625.504
	7	LIBOBA HIJRAH	1.969.383	578.751	2.548.134
17. GANE TIMUR	1	KESAYANGAN	2.087.686	578.751	2.666.437
	2	TOBARU (TABA)	1.969.383	578.751	2.548.134
	3	FOYA	2.134.463	618.751	2.753.214
	4	MAFFA	2.183.207	578.751	2.761.958
	5	LALUBI	2.196.263	578.751	2.775.014
	6	AKELAMO (FIDA)	2.089.383	578.751	2.668.134
	7	BOTONAM	2.018.601	578.751	2.597.352
	8	WOSI	2.621.567	578.751	3.200.318
	9	TANJUNG JERE	2.142.977	578.751	2.721.728

	10	KOTALOW	2.049.383	578.751	2.628.134
	11	SUMBER MAKMUR	2.273.272	578.751	2.852.023
	12	KEBUN RAJA	2.089.383	578.751	2.668.134
18. GANE TIMUR TENGAH	1	BISUI	2.413.907	578.751	2.992.658
	2	LELEWI	2.154.789	578.751	2.733.540
	3	LUIM	1.969.383	578.751	2.548.134
	4	MATUTING	2.949.385	578.751	3.528.136
	5	MATUTING TANJUNG	2.101.281	578.751	2.680.032
	6	TABAHIDAYAH	2.267.689	578.751	2.846.440
	7	TABAHIJRAH	2.387.993	578.751	2.966.744
	8	TAGEA	2.109.283	700.891	2.810.174
19. GANE TIMUR SELATAN	1	GANE LUAR	2.504.703	590.712	3.095.415
	2	GAIMU	2.148.243	578.751	2.726.994
	3	KUWO	1.969.383	578.751	2.548.134
	4	RANGA RANGA	2.152.734	578.751	2.731.485
	5	SAWAT	2.174.397	578.751	2.753.148
20. KAYOA	1	KIDA	1.969.383	578.751	2.548.134
	2	BULI	1.992.985	578.751	2.571.736
	3	LELEY	2.112.378	778.787	2.891.165
	4	TALIMAU	2.179.338	578.751	2.758.089
	5	GUNANGE	2.139.389	578.751	2.718.140
	6	LAIGOMA	3.149.255	578.751	3.728.006
	7	GAFI	1.999.480	578.751	2.578.231
	8	SIKO	2.040.631	578.751	2.619.382
	9	GURAPIN	2.091.484	1.388.559	3.480.043
	10	BAJO	1.969.383	578.751	2.548.134
	11	KARAMAT	2.002.471	578.751	2.581.222
	12	DOROLAMO	1.969.383	578.751	2.548.134
	13	TAWABI	2.002.848	578.751	2.581.599
	14	LIGUA	1.969.383	578.751	2.548.134
21. KAYOA BARAT	1	BUSUA	2.192.983	578.751	2.771.734
	2	BOKIMIAKE	2.286.343	578.751	2.865.094
	3	FAFAO	1.969.383	578.751	2.548.134

	4	HATEJAWA	2.184.103	578.751	2.762.854
22. KAYOA UTARA	1	LARUMABATI	2.051.903	961.538	3.013.441
	2	AKEJAILOLO	1.996.413	578.751	2.575.164
	3	GAYAP	2.114.081	578.751	2.692.832
	4	MODAYAMA	2.288.633	578.751	2.867.384
	5	NGOKOMALAKO	1.997.586	578.751	2.576.337
	6	WAYASIPANG	1.991.983	578.751	2.570.734
23. KAYOA SELATAN	1	LALUIN	2.117.171	578.751	2.695.922
	2	ORIMAKURUNGA	1.969.383	578.751	2.548.134
	3	PASIR PUTIH	1.969.383	578.751	2.548.134
	4	POSI POSI	1.969.383	578.751	2.548.134
	5	SAGAWELE	2.037.383	578.751	2.616.134
	6	NGUTE NGUTE	1.969.383	578.751	2.548.134
24. OBI	1	ANGGAI	4.700.589	614.351	5.314.940
	2	SAMBIKI	5.139.900	578.751	5.718.651
	3	JIKOTAMU	7.208.183	2.110.743	9.318.926
	4	BUTON	5.789.800	853.172	6.642.972
	5	LAIWUI	4.706.408	720.211	5.426.619
	6	KAMPUNG BARU	4.563.922	578.751	5.142.673
	7	KAWASI	2.041.945	39.778.522	41.820.467
	8	AKE GULA	3.277.199	578.751	3.855.950
	9	AIR MANGGA INDAH	3.150.585	578.751	3.729.336
25. OBI SELATAN	1	LOLEO	2.056.503	578.751	2.635.254
	2	MANO	2.149.979	578.751	2.728.730
	3	SOLIGI	2.342.057	578.751	2.920.808
	4	WAYALOAR	2.345.351	578.751	2.924.102
	5	FLUK	2.057.583	578.751	2.636.334
	6	BOBO	1.969.383	578.751	2.548.134
	7	GAMBARU	1.969.383	578.751	2.548.134
	8	OCIMALOLEO	1.999.294	578.751	2.578.045

26. OBI TIMUR	1	SUM	2.183.383	578.751	2.762.134
	2	KELLO	2.006.241	578.751	2.584.992
	3	SOSEPE	1.983.175	578.751	2.561.926
	4	WOOI	1.969.383	578.751	2.548.134
27. OBI BARAT	1	JIKOHAI	2.045.723	578.751	2.624.474
	2	ALAM KENANGA	2.059.383	578.751	2.638.134
	3	ALAM PELITA	2.086.931	578.751	2.665.682
	4	MANATAHAN	2.267.303	578.751	2.846.054
	5	SOASANGAJI	1.969.383	578.751	2.548.134
	6	TAPA	2.060.089	578.751	2.638.840
28. OBI UTARA	1	MADOPOLO	2.797.643	654.551	3.452.194
	2	CAP	2.159.383	578.751	2.738.134
	3	GALALA	1.969.383	578.751	2.548.134
	4	MADOPOLO BARAT	2.489.499	578.751	3.068.250
	5	MADOPOLO TIMUR	10.214.877	578.751	10.793.628
	6	PASIR PUTIH	2.197.729	578.751	2.776.480
	7	WARINGI	2.025.633	578.751	2.604.384
29. MAKIAN	1	RABUTDAIYO	2.318.308	578.751	2.897.059
	2	KOTA	2.024.181	578.751	2.602.932
	3	GORUP	2.054.432	901.799	2.956.231
	4	WALO	2.046.689	578.751	2.625.440
	5	DALAM	2.057.100	578.751	2.635.851
	6	GITANG	2.197.355	578.751	2.776.106
	7	KYOWOR	2.078.242	578.751	2.656.993
	8	MATANTENGIN	2.148.191	578.751	2.726.942
	9	SANGAPATI	2.318.604	578.751	2.897.355
	10	SUMA	2.071.783	578.751	2.650.534
	11	PLOILI	2.148.189	578.751	2.726.940
	12	DAURI	2.099.496	578.751	2.678.247

	13	GURUA	2.151.182	578.751	2.729.933
	14	WAILOA	2.140.943	578.751	2.719.694
	15	WAIGITANG	2.050.603	578.751	2.629.354
30. MAKIAN BARAT	1	MATEKETEN	2.120.183	578.751	2.698.934
	2	MALAPAT	2.052.503	578.751	2.631.254
	3	BOBAWA	2.035.361	578.751	2.614.112
	4	UMBAWA	1.969.383	578.751	2.548.134
	5	TEGONO	2.037.324	578.751	2.616.075
	6	TALAPAON	2.041.383	578.751	2.620.134
	7	SEBELEI	2.115.646	578.847	2.694.493
<b>JUMLAH</b>			<b>817.252.794</b>	<b>240.181.541</b>	<b>1.057.434.335</b>

